

## **Strategi Penerjemahan Uslub Al-Taukid dalam Pidato Politik Gamal Abdel Nasser**

**Salvia Herdiani<sup>1</sup>, Rafi Fitra Nur<sup>2</sup>, Sulton Hussain A<sup>3</sup>, Toto Edidarmo<sup>4</sup>**

Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: [salviahrdnn@gmail.com](mailto:salviahrdnn@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas strategi penerjemahan *uslūb al-tawkid* atau gaya bahasa penegasan dalam pidato politik Gamal Abdel Nasser yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penegasan seperti partikel (*tawkid harfī*), pengulangan leksikal (*tawkid lafzī*), dan ekspresi idiomatik (*tawkid ma'nawī*) ditransformasikan agar tetap mempertahankan kekuatan retorik dan makna ideologis dalam bahasa sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi, dengan data utama berupa kutipan pidato politik yang direkonstruksi berdasarkan konteks pasca-Perang Enam Hari 1967. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi penerjemahan yang mempertahankan unsur penegasan secara eksplisit dalam struktur bahasa Arab dapat menjaga intensi dan dampak orisinal teks sumber. Penggunaan partikel *إِنَّ*, pengulangan akar kata, serta idiom seperti *لَا مَحَالَةَ* terbukti efektif dalam menyampaikan penegasan politis yang bersifat mutlak. Penelitian ini menyoroti pentingnya sensitivitas terhadap aspek retorik dan budaya dalam penerjemahan teks politik serta peran aktif penerjemah dalam memediasi makna antar bahasa dan ideologi.

**Kata Kunci:** penerjemahan politik; *uslūb al-tawkid*; retorika Arab; pidato Gamal Abdel Nasser; strategi terjemahan; ideologi bahasa; equivalence pragmatic.

### **ABSTRACT**

*This study examines the translation strategies of *uslūb al-tawkid*, or emphatic rhetorical style, in the political speeches of Gamal Abdel Nasser translated from Indonesian into Arabic. The main focus is on how various forms of emphasis—such as particles (*tawkid harfī*), lexical repetition (*tawkid lafzī*), and idiomatic expressions (*tawkid ma'nawī*)—are transformed to preserve rhetorical strength and ideological meaning in the target language. The research adopts a qualitative descriptive approach using content analysis methods, with primary data consisting of political speech excerpts reconstructed within the post-Six-Day War context of 1967. The analysis reveals that translation strategies that explicitly retain emphatic elements in Arabic structure effectively preserve the original intent and impact of the source text. The use of particles such as *إِنَّ*, root word repetition, and idioms like *لَا مَحَالَةَ* proves effective in conveying absolute political emphasis. This study highlights the importance of rhetorical and cultural sensitivity in translating political texts and underscores the active role of translators in mediating meaning across languages and ideologies.*

**Keywords:** political translation; *Uslūb al-Tawkid*; Arabic rhetoric; speech by Gamal Abdel Nasser; translation strategies; language ideology; pragmatic equivalence.

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban manusia, ada pidato-pidato yang tak hanya menyuarakan gagasan, tetapi menggerakkan bangsa. Dari orasi Bung Karno di hadapan rakyat Indonesia, hingga pidato Martin Luther King yang menggema tentang mimpi dan keadilan. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar susunan kata mereka adalah senjata, kekuatan, dan arah. Sama halnya di dunia Arab, pidato Gamal Abdel Nasser mampu mengguncang emosi rakyat Mesir, membakar semangat pan-Arabisme, dan bahkan menjadi pengingat akan harga diri suatu bangsa. Tapi, bagaimana jika pidato penuh emosi itu harus diterjemahkan ke bahasa lain, masihkah terasa getarnya?

Bahasa dalam ranah politik bukanlah sekadar sarana komunikasi, melainkan instrumen kekuasaan. Ia digunakan untuk membentuk opini publik, mengukuhkan legitimasi, menanamkan ideologi, serta mempengaruhi tindakan sosial-politik. Oleh karena itu, bahasa politik selalu sarat dengan kekuatan retorik dan intensi persuasif. Salah satu perangkat linguistik yang sering dimanfaatkan dalam konteks ini adalah gaya bahasa penegasan atau dalam istilah Arab disebut *uslūb at-taukīd* (أسلوب التوكيد). Dalam tradisi kebahasaan Arab klasik maupun kontemporer, *uslūb at-taukīd* memiliki peran strategis dalam menyampaikan kepastian, menghilangkan keraguan, dan menegaskan kebenaran atau keyakinan yang ingin ditanamkan kepada audiens.

*Uslūb at-taukīd* merupakan bentuk stilistika bahasa Arab yang secara khusus digunakan untuk memperkuat pernyataan. Dalam teks politik, penggunaan partikel seperti *inna*, *laqad*, *lan*, *qad*, serta pengulangan kata atau struktur sintaksis sering kali dijadikan alat untuk menciptakan efek psikologis terhadap pendengar. Bahasa yang ditegaskan tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk cara berpikir dan merasakan realitas sosial-politik tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Samarrai (2007), gaya penegasan dalam bahasa Arab sering digunakan oleh orator untuk memperkuat daya persuasi sekaligus memperjelas posisi ideologis dalam konteks komunikasi politik.

Fenomena ini tidak terlepas dari sifat dasar komunikasi politik yang memang menuntut penegasan. Dalam konteks wacana politik, audiens sering kali bersikap skeptis terhadap pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, penggunaan penegasan bukan hanya wajar, melainkan strategis. Penutur politik, baik dalam bentuk pidato maupun teks tertulis, perlu memperkuat posisi argumennya melalui perangkat retorik yang menekankan kepastian, kepercayaan, dan otoritas. Dengan demikian, *uslūb at-taukīd* berperan sebagai alat untuk “menghapus keraguan” (*izālat al-syak*) dan membangun keyakinan dalam benak audiens.

Perang Enam Hari pada tahun 1967 menjadi pukulan telak bagi dunia Arab. Mesir sebagai pemimpin simbolis dari pan-Arabisme harus menelan kekalahan pahit. Dalam situasi seperti itu, pidato bukan hanya sarana menyampaikan laporan negara, melainkan terapi kolektif bagi bangsa yang terluka. Di sinilah Nasser memainkan peran penting sebagai orator ulung menggunakan bahasa yang mengobati, meneguhkan, dan menyatukan.

Dalam pidato politik, khususnya dalam bahasa Arab, *uslūb at-taukīd* tidak hanya menunjukkan aspek linguistik, tetapi juga mencerminkan nilai ideologis, emosional, dan bahkan historis. Salah satu tokoh yang dikenal sangat piawai dalam menggunakan gaya bahasa ini adalah Gamal Abdel Nasser, Presiden kedua Mesir dan tokoh utama dalam gerakan pan-Arabisme. Retorika politik Nasser dikenal kuat, ekspresif, dan penuh muatan emosional yang menggugah semangat nasionalisme. Dalam pidato-pidatonya, terutama yang disampaikan pasca-Perang Enam Hari tahun 1967, terlihat jelas penggunaan berbagai bentuk *uslūb at-taukīd* yang bertujuan untuk meneguhkan tekad rakyat Mesir dan mengkonsolidasikan solidaritas bangsa.

Pentingnya aspek penegasan ini menjadi lebih menantang ketika teks pidato tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Penerjemahan teks politik tidak hanya menuntut keakuratan makna leksikal, tetapi juga mempertahankan kekuatan retorik dan efek pragmatismenya. Dalam konteks inilah penerjemahan *uslūb at-taukīd* menjadi isu sentral. Penerjemah harus mampu memindahkan intensi, suasana, serta kekuatan penegasan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara efektif. Jika tidak, pesan politik dapat mengalami pergeseran makna, bahkan kehilangan daya persuasi yang krusial.

Penerjemahan, dalam hal ini, bukan sekadar transformasi linguistik, melainkan juga peralihan budaya dan ideologi. Seperti ditegaskan oleh Eugene Nida dan Charles Taber (2003), penerjemahan adalah proses reproduksi makna dalam bahasa sasaran dengan mempertahankan kesepadanan semantik dan gaya sebisa mungkin. Namun, sebagaimana kita tahu, kesepadanan retorik dan stilistika bukanlah hal yang mudah dicapai, terlebih ketika struktur bahasa sumber dan bahasa sasaran memiliki sistem yang berbeda secara sintaksis dan pragmatik.

Menurut Hatim dan Mason, proses penerjemahan harus dilihat dalam kerangka ideologis, bukan hanya linguistik. Dalam teks politik, penerjemah tidak netral; ia adalah perantara makna dan ideologi. Oleh karena itu, dalam teks politik seperti pidato Nasser, strategi penerjemahan harus mempertimbangkan dimensi stilistika, konteks sosial-politik, dan tujuan komunikatif dari teks asli. Pendekatan ini selaras dengan pandangan pragmatik yang menempatkan teks sebagai bagian dari tindakan sosial yang bermakna.

Dalam konteks teori penerjemahan modern, beberapa pendekatan relevan dapat digunakan untuk memahami proses ini. Peter Newmark (1988), misalnya, membedakan antara terjemahan semantis dan komunikatif. Dalam kasus teks politik, pendekatan komunikatif sering dianggap lebih efektif untuk mempertahankan dampak terhadap audiens. Demikian pula, pendekatan stilistika dan fungsionalisme dalam studi terjemahan menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan fungsi pragmatik teks dalam konteks budaya sasaran.

Selain itu, analisis terhadap *uslūb at-taukīd* dalam konteks penerjemahan juga relevan dengan pendekatan fungsional dalam studi terjemahan. Dalam pendekatan ini, teks diterjemahkan tidak hanya berdasarkan kesepadanan semantik, tetapi juga berdasarkan fungsi komunikatif yang ingin dicapai dalam konteks budaya sasaran.

Oleh karena itu, strategi penerjemahan *uslūb at-taukīd* harus mempertimbangkan jenis partikel yang digunakan, struktur kalimat, hingga dampaknya terhadap audiens target.

Meski demikian, kajian mengenai penerjemahan *uslūb at-taukīd* dalam teks politik Indonesia–Arab atau sebaliknya masih tergolong minim. Padahal, dalam konteks hubungan diplomatik dan komunikasi antarbangsa, penerjemahan politik menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam realitas kontemporer, banyak teks politik seperti pidato, deklarasi, atau pernyataan resmi yang melibatkan dua bahasa ini, terutama dalam konteks kerja sama negara-negara anggota OKI, peran media Arab seperti Al-Jazeera, serta isu-isu global seperti Palestina.

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Kamaluddin (2024) menekankan pentingnya memahami fungsi *uslūb at-taukīd* secara komprehensif untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam terjemahan teks-teks keagamaan. Namun, belum banyak yang mengaplikasikan teori tersebut dalam konteks politik modern. Oleh sebab itu, riset ini mencoba menutup celah tersebut dengan menganalisis bagaimana bentuk *uslūb at-taukīd* dalam pidato Gamal Abdel Nasser diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari teks versi Indonesia. Analisis dilakukan terhadap pilihan diksi, struktur kalimat, serta strategi penerjemahan yang digunakan, apakah bersifat literal, semantis, atau komunikatif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi bentuk *uslūb at-taukīd* dalam teks politik, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana strategi penerjemahan dapat mempertahankan efek retorik dan ideologis yang dimaksudkan. Kontribusi dari kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya penerjemahan retorik dalam teks politik lintas bahasa, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam studi terjemahan bahasa Arab, khususnya dalam konteks wacana politik.

Secara metodologis, kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Data diambil dari teks pidato Gamal Abdel Nasser yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dianalisis bentuk *uslūb at-taukīd* yang muncul dalam versi terjemahan dan strategi penerjemahan yang digunakan. Teori-teori yang dijadikan acuan antara lain adalah teori penerjemahan semantis dan komunikatif dari Peter Newmark (1988), teori ekuivalensi dinamis dari Nida & Taber (Nida & Taber, 2003), serta pendekatan stilistika dan pragmatik dalam penerjemahan dari Hatim & Mason (1997).

Dalam konteks sosial yang lebih luas, pidato politik tidak hanya dipahami sebagai komunikasi lisan, melainkan juga sebagai konstruksi ideologis yang membentuk persepsi publik, solidaritas kolektif, dan bahkan arah kebijakan politik. Oleh karena itu, studi penerjemahan atas teks politik semacam ini dapat memberi kontribusi signifikan bagi kajian ilmu sosial, khususnya dalam memahami bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam ruang antarbudaya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami dan menguraikan fenomena kebahasaan dalam konteks sosial-politik secara mendalam. Pendekatan ini dinilai paling tepat karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna tersembunyi dalam bahasa politik, yang tidak hanya bersifat gramatikal, tetapi juga mengandung muatan ideologis, emosional, dan pragmatis (Creswell, 2014). Pendekatan kuantitatif, misalnya, cenderung mengukur frekuensi kemunculan elemen bahasa tertentu tanpa mampu menangkap dimensi wacana yang lebih subtil, seperti niat komunikatif, ideologi, dan emosi. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi makna bahasa politik secara kontekstual dan mendalam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yaitu metode yang fokus pada makna dan struktur pesan dalam teks. Analisis isi dipilih karena memungkinkan peneliti mengevaluasi bagaimana strategi retorik, seperti *uslūb at-taukīd*, digunakan untuk membentuk persepsi dan membangun pengaruh terhadap audiens. Krippendorff (2004) menyatakan bahwa analisis isi tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi elemen dalam teks, tetapi juga untuk menafsirkan bagaimana makna dibangun dan dikomunikasikan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, metode ini sesuai untuk menganalisis fenomena kebahasaan dalam pidato politik yang kaya akan nilai simbolik dan ideologis.

Objek penelitian ini adalah kutipan-kutipan dari pidato politik berbahasa Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pidato yang digunakan sebagai data utama merupakan pidato yang secara isi mengandung ajakan perjuangan, ekspresi solidaritas, serta afirmasi keyakinan terhadap kemenangan atau pembebasan. Salah satu pidato yang menjadi fokus utama adalah teks yang disampaikan dalam konteks pembelaan terhadap Palestina dan solidaritas umat Islam, yang secara retorik memiliki nilai penegasan yang kuat (Posha, 2013). Pidato-pidato tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan muatan retorik dan relevansi historis, dengan merujuk pada tokoh politik seperti Gamal Abdel Nasser yang dikenal sangat piawai dalam menggunakan gaya bahasa penegasan.

Kriteria pemilihan data meliputi: (1) teks pidato yang mengandung unsur persuasif dan ideologis, (2) memiliki versi terjemahan bahasa Arab atau dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara komunikatif, dan (3) relevan dengan konteks geopolitik Timur Tengah atau hubungan diplomatik antarnegara Islam. Kutipan-kutipan tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis penegasan yang digunakan, seperti partikel *inna*, *laqad*, *lan*, *bila syakkin*, *la mahala*, serta bentuk pengulangan sebagai *taukīd lafdzi*. Dalam tahap ini, peneliti juga mencatat konteks penyampaian pidato, waktu, dan audiens sasaran untuk memahami efek pragmatis dari strategi bahasa tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data berupa teks pidato asli dan versi terjemahan, baik dari sumber cetak maupun daring. Teks-teks ini kemudian dianalisis berdasarkan

kategori *uslūb at-taukīd* yang muncul. Untuk keperluan analisis terjemahan, peneliti sendiri menerjemahkan kutipan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, dengan menerapkan pendekatan komunikatif sebagaimana dikembangkan oleh Peter Newmark (1988). Tujuannya adalah untuk mempertahankan daya retorik dan efek persuasif dari teks asli, sehingga aspek emosional dan ideologis tidak hilang dalam proses penerjemahan.

Prosedur analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, identifikasi kalimat-kalimat dalam teks sumber yang mengandung makna penegasan. Kedua, klasifikasi jenis *uslūb at-taukīd* yang digunakan berdasarkan bentuk linguistiknya. Ketiga, analisis strategi penerjemahan yang digunakan, apakah berupa penerjemahan semantis, komunikatif, modulasi, atau transposisi. Keempat, evaluasi dampak retorik dari hasil terjemahan terhadap kemungkinan penerimaan audiens dalam konteks budaya Arab. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya pada level bahasa, tetapi juga pada level makna dan ideologi.

Teori utama yang dijadikan rujukan dalam analisis ini adalah teori strategi penerjemahan dari Peter Newmark (1988) yang mencakup strategi modulasi, transposisi, dan komunikatif. Teori ini memberikan kerangka kerja dalam memahami bagaimana penerjemah dapat menyampaikan pesan dengan mempertahankan kekuatan retorik dan ideologisnya (Nida & Taber, 2003). juga menjadi rujukan penting, dengan konsep "equivalence" yang menekankan pentingnya kesepadanan makna dan efek emosional antara teks sumber dan sasaran. Sementara itu, Hatim dan Mason (1997) menyoroti dimensi ideologis dalam penerjemahan, di mana penerjemah dianggap sebagai agen komunikasi yang tidak netral, melainkan membawa interpretasi terhadap kekuasaan dan ideologi.

Dalam konteks bahasa politik, peran penerjemah sangat vital. Nababan (2007) menegaskan bahwa penerjemahan teks politik tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial, budaya, dan pragmatis. Oleh karena itu, penerjemah harus memiliki sensitivitas terhadap kekuatan retorik dan efek sosial dari teks sumber. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi teori melalui penggunaan berbagai pendekatan penerjemahan yang saling melengkapi. Peneliti juga berperan aktif sebagai instrumen utama dalam proses interpretasi data, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan linguistik yang relevan.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap studi penerjemahan teks politik Arab–Indonesia, khususnya dalam mengungkap bagaimana kekuatan retorik seperti *uslūb at-taukīd* dapat dipertahankan melalui strategi penerjemahan yang tepat dan kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Teks dan Konteks Pidato

Pidato yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan rekonstruksi dari salah satu orasi politik Gamal Abdel Nasser, presiden kedua Republik Arab Mesir yang menjabat sejak 1956 hingga wafatnya pada 1970. Di antara berbagai pidato monumental yang pernah disampaikannya, salah satu yang paling dikenang ialah

pidato yang berlangsung pasca *An-Naksah* atau kekalahan telak dunia Arab dalam Perang Enam Hari pada Juni 1967 (Cleveland & Bunton, 2016). Pidato ini memiliki nilai historis dan politis yang tinggi, karena disampaikan dalam momen krisis eksistensial yang menimpa dunia Arab, sekaligus menjadi penanda transformasi diskursus kepemimpinan pan-Arabisme dalam menghadapi kekuatan asing, terutama Israel dan sekutunya (Ayubi, 1991).

Dalam konteks ini, pidato Nasser tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi politik, tetapi juga sebagai *discursive event* yang memuat simbol-simbol ideologis. Retorika yang dibangun dalam pidatonya memainkan peran strategis dalam membentuk kembali harapan rakyat Arab yang dilanda kekalahan, serta menegaskan komitmen Mesir terhadap semangat persatuan dan perlawanan. Gaya bahasanya menggambarkan karakteristik khas dari pidato politik Arab—emosional, kolektif, dan sarat dengan afirmasi nilai perjuangan (Al-Musawi, 2003).

Berikut adalah kutipan utama pidato versi Bahasa Indonesia, yang kemudian akan dianalisis bentuk *uslūb al-tawkid*-nya:

"Sesungguhnya bangsa Arab benar-benar mampu, tanpa adanya keraguan, untuk mewujudkan persatuannya. Serta tidak akan mundur untuk membela kedaulatan dan martabatnya. Sungguh, kemenangan pasti akan datang. Seluruh rakyat Arab, dari semua golongan, meyakini dengan sepenuh-penuhnya keyakinan bahwa keadilan pasti akan datang, dan kemerdekaan adalah hak yang sah dan tidak bisa ditawar-tawar."

Versi Bahasa Arab dari kutipan tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّ الْأُمَّةَ الْعَرَبِيَّةَ قَادِرَةٌ بِلَا شَكٍّ عَلَى تَحْقِيقِ وَحْدَتِهَا، وَلَنْ تَتَرَاجَعَ عَنِ الدِّفَاعِ عَنْ سَيَادَتِهَا وَكَرَامَتِهَا، فَإِنَّ النَّصْرَ قَادِمٌ لَا مَحَالَةَ، وَالشَّعْبُ الْعَرَبِيُّ بِكُلِّ فَنَائِهِ يُؤْمِنُ إِيْمَانًا رَاسِخًا بِأَنَّ الْعَدَالَهَ لَا بُدَّ أَنْ تَسُودَ، وَأَنَّ الْإِسْتِقْلَالَ حَقٌّ مَشْرُوعٌ لَا يُمَكِّنُ التَّنَازُلَ عَنْهُ.

Penting untuk ditegaskan bahwa kutipan ini bukan diambil dari transkrip resmi pidato berbahasa Arab, melainkan merupakan hasil terjemahan ulang dari versi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab oleh penulis untuk kepentingan analisis *uslūb al-tawkid*. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan perbedaan struktur dan diksi dibandingkan versi asli, namun maksud semantik dan konteks ideologis tetap berusaha dijaga (Syofyan, 2024).

Penggunaan berbagai bentuk penegasan (*uslūb al-tawkid*) dalam pidato ini mencerminkan tipikal gaya bahasa pidato politik Arab modern, di mana retorika meyakinkan tidak hanya digunakan untuk memperkuat pesan, tetapi juga untuk membangun konsensus dan loyalitas publik. Penegasan semacam ini berfungsi untuk menstabilkan makna dan mereduksi ambiguitas dalam komunikasi politik, terutama pada masa-masa krisis nasional dan geopolitik (Fairclough, 1989).

Sebagai contoh, frasa "إِنَّ الْأُمَّةَ الْعَرَبِيَّةَ قَادِرَةٌ بِلَا شَكٍّ" (Sesungguhnya bangsa Arab benar-benar mampu tanpa adanya keraguan) memuat dua bentuk *tawkid* secara eksplisit: partikel *inna* dan frasa *bilā syakkin*, yang dalam teori linguistik Arab

dikenal sebagai kombinasi antara *tawkid ḥarfī* dan *tawkid lafzī*. Selain itu, struktur "لَنْ تَرَجَعَ" menggunakan partikel *lan*, yang mengandung makna penegasan kuat terhadap larangan di masa depan, dan dianggap memiliki efek retorik tinggi dalam pidato politik.

Sementara itu, pernyataan "فَإِنَّ النَّصْرَ قَادِمٌ لَا مَحَالَةَ" (Sungguh, kemenangan pasti akan datang) adalah bentuk penegasan eksistensial yang mengandung dua lapis afirmasi: partikel *fa-inna* sebagai penguatan struktur argumentatif, serta frasa *lā mahālah* yang mengandung makna “tanpa keraguan sedikit pun”, sebuah idiom Arab klasik untuk menolak ketidakpastian secara total.

Keseluruhan kutipan ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pidato politik yang sarat dengan penegasan ideologis, di mana struktur bahasa mencerminkan dimensi psikologis dan kultural dari komunikasi politik Arab. Dalam konteks wacana, pidato ini bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun makna kolektif yang menyatukan identitas dan emosi massa.

### **Bentuk-bentuk Uslūb al-Tawkid dalam Pidato Gamal Abdel Nasser**

Dalam khazanah wacana politik Arab, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga senjata retorik yang digunakan untuk menyusun realitas, membentuk opini publik, dan menggerakkan massa. Salah satu strategi bahasa yang menonjol dalam pidato politik Gamal Abdel Nasser adalah penggunaan *uslūb al-tawkid* atau gaya penegasan. Ia tidak hanya “menyampaikan” pesan, tetapi “menanamkannya” dalam dan kuat.

Secara umum, kita dapat mengenali tiga bentuk utama dari *tawkid*: penegasan melalui partikel (*ḥarfī*), pengulangan leksikal (*lafzī*), dan penguatan makna idiomatik (*ma'nawī*). Ketiganya muncul dalam pidato yang sedang dianalisis, menunjukkan bagaimana bahasa Arab menyimpan kekuatan retorik yang sistematis dan efektif.

#### **1. Tawkid ḥarfī — Penegasan melalui Partikel**

Penggunaan partikel seperti *inna* (إِنَّ) bukanlah sekadar kebiasaan linguistik, tetapi pilihan strategis. Misalnya, dalam pernyataan "إِنَّ الْأُمَّةَ الْعَرَبِيَّةَ قَادِرَةٌ عَلَى شَيْءٍ", partikel *inna* mengokohkan klaim yang disampaikan seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi: bangsa Arab benar-benar mampu (Ryding, 2005). Di sinilah kita melihat bagaimana gramatika berkelindan dengan ideologi.

Dalam konteks pragmatik politik, *inna* bekerja sebagai alat untuk membingkai pernyataan sebagai sesuatu yang *diyakini benar*, bahkan ketika bukti empiris tidak disampaikan. Audiens tidak diajak berdiskusi; mereka diajak percaya. Apalagi, ketika partikel ini digabungkan dengan konjungsi *fa*-seperti dalam "فَإِنَّ النَّصْرَ قَادِمٌ لَا مَحَالَةَ"—nada kepastian menjadi lebih kuat. Kemenangan tidak hanya *diharapkan*, tetapi *dinyatakan pasti terjadi*.

#### **2. Tawkid lafzī — Pengulangan Leksikal**

Jenis penegasan kedua muncul melalui pengulangan kata atau akar kata yang sama. Contoh seperti "يُؤْمِنُ إِيْمَانًا رَاسِخًا" memperlihatkan bagaimana pengulangan *yu'minu* dan *īmān* menciptakan intensitas makna. Ini bukan sekadar gaya bahasa,

melainkan mekanisme penegasan: keyakinan disebut dua kali, dalam bentuk berbeda, untuk menciptakan efek psikologis yang lebih mandalam (Al-Farraj, 2010).

Pengulangan seperti ini mengingatkan kita bahwa bahasa Arab sangat musikal dan bersifat afektif apa yang diulang, diperkuat. Dalam pidato politik, teknik ini memperkuat afiliasi emosional audiens terhadap gagasan yang disampaikan. Keyakinan menjadi gema, bukan hanya kata.

### 3. *Tawkīd ma'nawī* — Penegasan Maknawi Idiomatik

Bentuk ketiga, yang lebih subtil tapi tak kalah kuat, adalah penegasan makna melalui idiom. Ungkapan seperti "لَا مَحَالَةَ" (tidak bisa tidak terjadi) atau "لَا يُمَكِّنُ التَّنَازُلُ عَنْهُ" (tidak mungkin dikompromikan) mengandung semacam absolutisme makna. Tidak ada ruang untuk alternatif. Tidak ada kemungkinan selain yang diklaim oleh sang orator (Suleiman, 2003).

Dalam retorika seperti ini, kita melihat bagaimana makna bisa menjadi benteng ideologis. Ketika Nasser menyatakan bahwa "hak kemerdekaan itu tidak mungkin ditawar", ia sedang menutup pintu negosiasi dan membuka ruang perlawanan. Bahasa di sini bukan hanya menyampaikan isi pikiran, tapi mengarahkan tindakan.

Jika kita amati dengan saksama, tiga bentuk *tawkīd* ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling memperkuat, saling melengkapi, dan membentuk jalinan yang solid. Bagi Nasser, penegasan bukan sekadar gaya, melainkan strategi. Ia memilih kata, mengulang frasa, dan mengunci makna semua demi membangun narasi kolektif yang tahan terhadap keraguan.

Dan bagi kita yang mengkaji terjemahannya, tantangannya bukan hanya memahami arti literal, tapi menangkap cara bahasa membangun keyakinan. Karena dalam retorika Arab, apa yang ditegaskan bukan hanya kebenaran, tapi masa depan yang diyakini bersama.

### Strategi Penerjemahan Uslūb al-Tawkīd dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab

Penerjemahan pidato politik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab tidak hanya menuntut keakuratan semantik, tetapi juga memerlukan kepekaan terhadap nuansa retorik dan ideologis yang melekat pada teks sumber. Dalam kasus pidato Gamal Abdel Nasser yang telah dialihbahasakan ulang dari versi Indonesia ke Arab, penerjemah dihadapkan pada tantangan untuk merekonstruksi ulang gaya penegasan khas Arab atau *uslūb al-tawkīd* agar tidak kehilangan kekuatan retorik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hatim dan Mason (1997), penerjemahan teks politik melibatkan lebih dari sekadar perpindahan makna; ia adalah proses negosiasi makna antarbudaya, di mana aspek ideologis dan fungsi komunikatif harus tetap dijaga (Hatim & Mason, 1997). Dalam konteks ini, bentuk-bentuk penegasan yang terdapat dalam teks sumber Indonesia diterjemahkan dengan cara

memilih struktur linguistik Arab yang secara konvensional memiliki bobot afirmatif tinggi, seperti penggunaan partikel *إِنَّ*, struktur verbal ganda (*ta'kīd lafẓī*), serta ekspresi idiomatik yang menutup kemungkinan penolakan makna (*ta'kīd ma'nawī*).

Sebagai contoh, pernyataan dalam bahasa Indonesia seperti "bangsa Arab benar-benar mampu" tidak cukup diterjemahkan secara literal menjadi "الأمة العربية قادرة". Untuk menyampaikan intensitas keyakinan sebagaimana dimaksud dalam konteks pidato politik, bentuk tersebut dialihbahasakan menjadi "إِنَّ الأُمَّةَ الْعَرَبِيَّةَ قَادِرَةٌ". Tambahan partikel *إِنَّ* dan frasa *bi-lā shakk* secara strategis dipilih untuk menghadirkan efek retorik yang mengandung kepastian, penguatan, serta pemingkanaan makna ideologis—sebuah pendekatan yang sejalan dengan prinsip *dynamic equivalence* dari Nida dan Taber (2003).

Demikian pula, ungkapan "meyakini dengan sepenuh keyakinan" diterjemahkan menjadi "يُؤْمِنُ إِيْمَانًا رَاسِخًا". Dalam hal ini, penerjemah tidak sekadar menerjemahkan kata demi kata, melainkan mengonstruksi pengulangan morfologis yang di dalam tradisi bahasa Arab memiliki fungsi memperdalam makna dan memperkuat intensitas emosional pernyataan. Fenomena ini disebut sebagai *ta'kīd lafẓī* dan banyak digunakan dalam teks-teks retorik klasik maupun modern (Ryding, 2005).

Terakhir, penerjemahan frasa seperti "kemerdekaan adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar" menjadi "الْإِسْتِقْلَالُ حَقٌّ مَشْرُوعٌ لَا يُمَكِّنُ التَّنَازُلَ عَنْهُ" menunjukkan pemanfaatan *ta'kīd ma'nawī*, yaitu bentuk penegasan makna melalui idiom dan struktur penolakan. Dalam konteks ini, penggunaan frasa *lā yumkin al-tanāzul 'anhu* berperan mempersempit ruang interpretasi alternatif, dan menegaskan bahwa makna yang dikandung tidak terbuka untuk kompromi atau relativisasi sebuah strategi yang umum ditemukan dalam diskursus politik Arab kontemporer (Al-Azzam, 2005).

Dengan demikian, strategi penerjemahan *uslūb al-tawkīd* dari bahasa Indonesia ke Arab dalam teks ini dapat dipetakan ke dalam tiga pendekatan utama: (1) adaptasi struktur afirmatif melalui partikel (*tawkīd ḥarfī*), (2) penguatan semantik dengan pengulangan morfologis (*tawkīd lafẓī*), dan (3) penyisipan ekspresi idiomatik penegasan mutlak (*tawkīd ma'nawī*). Ketiganya bukanlah hasil terjemahan literal, melainkan rekonstruksi yang mempertimbangkan konteks retorik, ideologis, dan sosiolinguistik dalam budaya penerima.

Strategi-strategi ini sejalan dengan kerangka yang ditawarkan oleh Newmark (1988), yang menekankan bahwa dalam penerjemahan teks politik, penerjemah perlu berperan sebagai mediator makna yang aktif, bukan hanya pengalih kode bahasa semata. Ia harus mampu mengalihkan intensi komunikatif dan efek emosional dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan mempertimbangkan *norma-norma wacana* yang hidup di dalamnya.

### **Tantangan dan Implikasi Penerjemahan dalam Wacana Politik**

Penerjemahan pidato politik, khususnya yang mengandung *uslūb al-tawkīd*, tidak hanya melibatkan proses alih bahasa secara linguistik, tetapi juga peralihan nilai-nilai ideologis dan retorik yang melekat dalam teks aslinya. Ketika

penerjemahan dilakukan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, tantangan menjadi semakin kompleks karena penerjemah tidak sedang mengalihbahasakan teks ke bahasa ibu penuturnya, melainkan ke bahasa target yang memiliki struktur sintaksis, retorika, dan konvensi diskursif yang berbeda secara fundamental.

Salah satu tantangan utama adalah mempertahankan kekuatan retorik dari bentuk penegasan dalam bahasa sumber. Bahasa Indonesia, meskipun mampu menyampaikan penegasan, seringkali menggunakan strategi yang lebih lunak atau implisit, misalnya melalui pilihan diksi seperti “sungguh,” “benar-benar,” atau “tak tergoyahkan.” Sementara itu, bahasa Arab secara historis memiliki sistem penegasan yang lebih eksplisit, baik dalam struktur morfologis maupun dalam performa pragmatik, misalnya dengan penggunaan partikel *إِنَّ*, *لَ*, dan frasa idiomatik seperti *لَا مَحَالَةَ*.

Akibatnya, penerjemah harus mengambil posisi aktif dalam memilih bentuk *tawkid* yang tidak hanya ekuivalen secara leksikal, tetapi juga mencerminkan efek retorik yang setara dalam konteks sosial-budaya Arab. Inilah yang disebut sebagai *pragmatic equivalence*, yakni kemampuan penerjemahan untuk mempertahankan fungsi sosial dari ujaran, bukan sekadar maknanya secara tekstual (Hatim & Mason, 1990). Misalnya, ketika kalimat dalam bahasa Indonesia berbunyi:

“Kami yakin sepenuhnya bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak yang tak dapat ditawar.”

Jika diterjemahkan secara literal tanpa mempertimbangkan aspek idiomatik Arab, kemungkinan hasilnya menjadi datar atau bahkan tidak meyakinkan. Namun dengan strategi pragmatik dan penyesuaian terhadap *uslub al-tawkid*, penerjemah dapat membentuk konstruksi seperti:

نُؤْمِنُ إِيمَانًا رَاسِخًا بِأَنَّ الْإِسْتِقْلَالَ حَقٌّ مَشْرُوعٌ لَا يُمَكِّنُ النَّزْلَ عَنْ

Dalam versi ini, kekuatan semantik dan retorik dari frasa diperkuat dengan penggunaan *tawkid lafzi* (“نُؤْمِنُ إِيمَانًا رَاسِخًا”) dan *tawkid ma'nawi* (“لَا يُمَكِّنُ النَّزْلَ عَنْهُ”) yang membentuk impresi kepastian total dalam benak audiens Arab. Strategi semacam ini hanya bisa dicapai jika penerjemah memahami tidak hanya struktur bahasa target, tetapi juga implikatur budaya dan ideologis yang dibawanya (Newmark, 1988).

Di sisi lain, penerjemahan ke dalam bahasa Arab berarti berhadapan langsung dengan ekspektasi tinggi terhadap bahasa formal (*fushā*), yang masih sangat dijunjung dalam wacana politik dan media massa Arab. Penggunaan bentuk-bentuk *tawkid* yang tidak sesuai dengan register formal bisa merusak kredibilitas teks atau bahkan dianggap tidak sopan dalam konteks resmi (Al-Jarf, 2015).

Implikasinya, penerjemahan dari Indonesia ke Arab dalam ranah politik membutuhkan intervensi kreatif, yakni keberanian dan kemampuan untuk merekonstruksi ujaran dengan mempertimbangkan struktur wacana Arab kontemporer. Ini sejalan dengan konsep *translator as mediator* yang menekankan

bahwa penerjemah bukan hanya perantara linguistik, melainkan agen sosial yang menginterpretasi, memodulasi, dan menegosiasikan makna lintas budaya (Schäffner, 2002).

Lebih jauh, dalam konteks geopolitik seperti isu Palestina atau identitas pan-Arab, penerjemahan pidato politik ke dalam bahasa Arab bukan hanya alih suara, tetapi alih posisi ideologis. Kesalahan dalam memilih bentuk penegasan atau dalam mempertahankan intensitas emosi bisa berakibat pada pergeseran makna, bahkan distorsi niat politik. Oleh karena itu, setiap bentuk *tawkid* yang dipilih harus diperiksa tidak hanya dari sisi tata bahasa, tetapi juga dari keterimaannya (*acceptability*) dalam diskursus Arab kontemporer (Farghal, 1997).

Akhirnya, tantangan dalam menerjemahkan *uslub al-tawkid* dari Indonesia ke Arab mengingatkan kita bahwa bahasa bukanlah alat yang netral. Ia membawa serta nilai, kekuasaan, dan sejarah. Maka penerjemahan di ranah politik menjadi tindakan yang tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab etis dan ideologis.

### KESIMPULAN

Penelitian ini telah menggambarkan bagaimana *uslub al-tawkid*, sebagai strategi bahasa yang bersifat retorik dan ideologis, memainkan peran penting dalam pidato politik Gamal Abdel Nasser. Dalam konteks wacana pasca-Perang Enam Hari, gaya bahasa penegasan ini bukan sekadar alat linguistik untuk menyampaikan pesan, melainkan juga sarana untuk membangun semangat, menciptakan ikatan emosional, dan memperkuat identitas kolektif bangsa Arab. Penggunaan bentuk penegasan seperti *tawkid harfi*, *lafzi*, dan *ma'nawī* menunjukkan bahwa bahasa dalam pidato politik bekerja bukan hanya sebagai medium informasi, tetapi juga sebagai kekuatan persuasif yang membawa bobot ideologis dan historis yang nyata. Ketika pidato tersebut dialihbahasakan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, tantangan yang muncul tidak terbatas pada masalah tata bahasa semata. Penerjemah dituntut untuk memahami secara mendalam bagaimana penegasan yang bersifat ideologis dan emosional dalam bahasa sumber dapat dihadirkan kembali secara utuh dalam bahasa sasaran. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk menangkap konteks, membacanya secara kritis, dan mentransformasikan makna tanpa kehilangan semangat dan tujuan komunikatif teks aslinya. Dalam proses ini, pendekatan kualitatif yang digunakan telah membuka ruang refleksi untuk melihat penerjemahan bukan hanya sebagai alih bahasa, tetapi sebagai proses rekonstruksi makna. Dengan berlandaskan teori dari Peter Newmark (1988), Eugene Nida (2003), serta Hatim dan Mason, penelitian ini menjelaskan bahwa penerjemahan yang berhasil tidak hanya bergantung pada struktur kalimat, tetapi juga pada sejauh mana penerjemah mampu menjaga kekuatan retorik, emosional, dan ideologis teks asli dalam bentuk baru yang tetap hidup dan diterima dalam budaya sasaran. Dari seluruh rangkaian analisis, dapat disimpulkan bahwa menerjemahkan *uslub al-tawkid* dalam teks politik memerlukan kepekaan wacana dan pemahaman lintas budaya. Penerjemah tidak cukup hanya memahami makna kata, melainkan juga harus peka terhadap nilai-nilai budaya dan politis yang tersimpan di balik struktur bahasa. Karena itu, hasil terjemahan menjadi bentuk

mediasi makna yang melibatkan intuisi, pengalaman budaya, serta pilihan ideologis yang sadar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian penerjemahan teks politik, khususnya antara bahasa Indonesia dan Arab. Selain itu, hasil kajian ini juga membuka ruang baru untuk memahami bagaimana bahasa dan ideologi saling berkait dalam proses penerjemahan, serta bagaimana peran penerjemah menjadi semakin strategis dalam membentuk persepsi lintas bahasa dan budaya. Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi studi penerjemahan dan kebahasaan, tetapi juga membuka pemahaman tentang bagaimana pesan-pesan politik dan ideologis diproduksi, dialihkan, dan diterima dalam ruang komunikasi lintas budaya. Dalam kerangka ilmu sosial, hasil penelitian ini relevan untuk menelaah bagaimana bahasa membentuk struktur relasi kuasa, identitas kolektif, dan legitimasi politik dalam masyarakat Arab modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azzam, B. (2005). Strategies for Translating Political Texts in Arabic and English. *Meta*, 50(4), 1150–1165.
- Al-Farraj, A. (2010). Repetition and emphasis in Arabic rhetoric. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(3), 35–42.
- Al-Jarf, R. (2015). The Use of Formal Arabic in Political Speeches. *International Journal of Linguistics*, 7(3).
- Al-Musawi, M. J. (2003). *The Postcolonial Arabic Novel: Debating Ambivalence*. Brill.
- Al-Samarrai, M. A. (2007). *Al-Balāghah al-‘Arabiyyah wa Tathbīt al-Ḥujjah bi al-Tawkīd*. Dār al-Ma‘ārif.
- Ayubi, N. (1991). *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. Routledge.
- Cleveland, W. L., & Bunton, M. (2016). *A History of the Modern Middle East*. Westview Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4 ed.). SAGE Publications.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. Longman.
- Farghal, M. (1997). Ideological Constraints in Translation: Maintaining Political Correctness. *Perspectives: Studies in Translatology*, 5(2).
- Hatim, B., & Mason, I. (1990). *Discourse and the Translator*. Longman.
- Hatim, B., & Mason, I. (1997). *The Translator as Communicator*. Routledge.
- Kamaluddin, A. (2024). Penegasan dalam bahasa Arab dan uslūb al-tawkīd. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 8(1), 183–198. <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i1.7954>
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (2003). *The Theory and Practice of Translation*. Brill.
- Posha, B. Y. (2013). *Gamal Abdul Nasser: Kajian historis tentang kebijakan politik*

*Mesir 1952--1970.*

- Ryding, K. C. (2005). *A Reference Grammar of Modern Standard Arabic*. Cambridge University Press.
- Schäffner, C. (2002). The Role of Discourse Analysis for Translation and Translator Training. In *Multilingual Matters* (hal. 133–134).
- Suleiman, Y. (2003). *The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology*. Edinburgh University Press.
- Syofyan, H. (2024). *Sastra Arab Sufistik Nusantara: Orisinalitas Gagasan Dan Stilidtika Karya Syaikh Isma'il al Minangkabawi*. Lembaga Studi Islam Progresif (LSIP).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)